



**PENGAWASAN DINAS PERIKANAN INDRAGIRI HILIR TERHADAP IZIN USAHA
PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN DI KECAMATAN
TEMBILAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHAMMAD NOVRI

NIM. 11727101998

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"Pengawasan Dinas Perikanan Indragiri Hilir Terhadap Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kecamatan Tembilahan"**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Novri

NIM : 11727101998

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Mei 2021

Pembimbing Skripsi

H. Mohd. Kastulani, SH., MH
NIP.19630909 199202 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PENGAWASAN DINAS PERIKANAN INDRAGIRI HILIR TERHADAP IZIN USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN"* yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD NOVRI**
 NIM : 11727101998
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Joni Alizon, SH., M.H

Penguji II
Syafrinaldi SH., MA

[Handwritten signatures of the examiners]



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Muhammad Novri, (2021): Pengawasan Dinas Perikanan Indragiri Hilir Terhadap Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap izin usaha perikanan kepada pelaku usaha perikanan, banyak nya usaha perikanan yang tidak memiliki izin usaha di Kecamatan Tembilahan, membuat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan sangat dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Usaha Pasal 33 berbunyi “Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Perikanan” dan , Surat Izin Usaha Perikanan disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf a, b,dan c.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian di lapangan yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, Seksi Kemitraan dan Informasi Usaha Kecil Pembudidaya Ikan, Seksi Pencatatan Usaha Budidaya dan Kapal Perikanan, Pelaku usaha perikanan di Kecamatan Tembilahan yang memiliki izin usaha perikanan, Pelaku usaha perikanan di Kecamatan Tembilahan yang tidak memiliki izin usaha perikanan . Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan lokasi penelitian berada di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari penelitian ini diketahui bahwa Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya pelaku usaha perikanan yang tidak memiliki izin usaha perikanan. Sedangkan kendala yang menghambat pengawasan Dinas Perikanan terhadap izin usaha perikanan adalah, faktor komunikasi, faktor disposisi, faktor sumberdaya, serta faktor dana dan anggaran yang belum mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri hilir.

Kata kunci : Pengawasan, Dinas Perikanan, Izin Usaha Perikanan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, sesuai dengan waktu yang di jadwalkan. Shalawat beriring salam terucap kepada junjungan alam yakni Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu teknologi.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Muhammad Hatta, S. Sos, M. Ap, dan Ibu Indrawati, serta Adek M. Zulkhaidir dan Muhammad Habib Mubarak yang telah memberikan motivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih Bapak dan Ibu atas do'a restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof Dr. Suyitno, M. Ag Selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH, MH dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Muslim S. Ag, SH, M. Hum.
5. Bapak Mhd. Kastulani SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibuk Lysa Angrayni SH, MH selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terkhususnya Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ir. Ery Putra Selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Bapak Yusparizal, S. PI, M. Si, Selaku Kepala Bidang Pemberdaya Pembudidaya Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Bapak Lisbet, R. S. PKP, Selaku Seksi Kemitraan dan Informasi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
11. Bapak Wiliam Mursida, SE, M. Si, selaku Seksi Pencatatan Usaha Budidaya dan Kapal Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
12. Kepada Abang Sony Al Ihsan Marta , SH dan Abang Hendri, SH yang telah memberikan masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada kawan-kawan kelas IH E dan HTN E, serta kawan-kawan seangkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kepada kawan-kawan Tim KKN-DR Tembilahan Kota yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Tembilahan Pekanbaru yang telah memberikan masukan, saran, serta support demi kelancaran pembuatan skripsi ini.
16. Kepada kawan-kawan PKL Pengadilan Negeri Tembilahan yang telah memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
17. Kepada Fatmawati, Muhammad Nandi, M. Rizky Maulana, Jefri Hadi, Saputra, Eky Sudarno, Isnan Rasyidi, Ardiansyah, M. Pernanda Yusuf A. P, Aditya wahyu Maulana, Wahyu Ramadhan, Hairu Rahmah, Heru, Bani, Dito, Erma Liana, Widia, Ulfa Hidayati teman satu diskusi yang memberikan ilmu-ilmu baru.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambahkan khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru; 15 Juni 2021

MUHAMMAD NOVRI

NIM.11727101998

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM.....	17
A. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir	17
B. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.....	25
BAB III KAJIAN TEORI.....	32
A. Teori Pengawasan.....	32
B. Teori Perizinan	37
C. Teori Kewirausahaan	39
D. Teori Penegakan Hukum	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	46
A. Bagaimana Pengawasan Oleh Dinas Perikanan Terhadap Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan.....	46



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Apa Saja Kendala-kendala Yang Menghambat Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan	57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	: Populasi dan Sampel	13
Tabel II. 1	: Kalsifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelaminan Di Tembilahan	22
Tabel II. 2	: Agama Yang Di Anut Masyarakat Di Tembilahan.....	23
Tabel II. 3	: Sarana Ibadah Di Tembilahan.....	23
Tabel II. 4	: Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	25
Tabel IV. 1	: Potensi Kelautan dan Perikanan Kecamatan Tembilahan.....	48
Tabel IV. 2	: Tenaga Teknis Petugas Penyuluh Lapangan Kecamatan Tembilahan Tahun 2021.....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	: Bagan Susunan Organisasi Dinas	
	Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	28
Gambar III. 1	: Proses Pengawasan.....	37
Gambar IV. 1	: Prosedur Perolehan Izin	51





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (1) Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.¹ Indonesia pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintah berada pada kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan adalah merupakan perwujudan dari *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintah pusat.²

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional, perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan. Dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut maka terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1).

² Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 1993), hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penggabungan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Otonomi daerah telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-Undang. Menurut Ni'matul Huda otonomi luas bisa bertolak dari prinsip "Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya".³

Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (3) yaitu Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kelayanan umum, dan daya saing daerah.⁴ Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maka sistem Negara Indonesia yang merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik, dibentuk

³ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 45.

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan daerah sesuai Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Perkembangan Pemerintah Daerah di Indonesia sudah dimulai sejak Pemerintahan Kolonial Belanda pada Tahun 1903 dengan mengeluarkan *Desentralisatie Wet* merupakan dasar hukum pertama berkaitan desentralisasi di Indonesia, yang memberikan kekuasaan dalam pelaksanaan implementatif kebijakan desentralisasi di Hindia Belanda. *Desentralisatie Wet* 1903 merupakan hasil amandemen persial dari RR 1854 dengan cara memberikan tambahan tiga pasal baru diantaranya Pasal 68 dan Pasal 69 RR 1854.⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah membuat daerah-daerah membentuk peraturan daerahnya sendiri guna menjalankan otonomi daerah, seperti Kabupaten Indragiri Hilir, ada beberapa produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Sektor perikanan merupakan sektor yang sangat penting dalam kehidupan mata pencarian masyarakat Indragiri Hilir. Usaha perikanan merupakan semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18.

⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhiir Kekuasaan Kolonial di Indonesia 1900-1940*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 1 Ayat (1), yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.⁷ Sedangkan dalam Pasal 25 Ayat 1, disebutkan usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.⁸

Dalam pasal 25A Ayat 1, pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan,⁹ dalam hal mutu hasil perikanan perlu adanya karantina, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pasal 1 ayat 1, karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendaliannya terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka dan yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari

⁷ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 1 Ayat (1).

⁸ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 25 Ayat (1).

⁹ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 25A Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu Kabupaten yang memiliki potensi perikanan cukup besar di Provinsi Riau dimana terbentang Sungai Indragiri yang panjangnya kurang lebih mencapai 415 KM yang melintasi beberapa daerah di Provinsi Riau dan memiliki potensi yang meliputi perikanan laut, budidaya air tawar, budidaya ikan laut, dan tambak udang, dengan potensi laut yang beragam ini menjadikan sebagian penduduk Indragiri Hilir bermata pencaharian sebagai nelayan dan pengusaha dibidang usaha perikanan.

Dengan luas perairan yang dimiliki oleh Kabupaten Indragiri Hilir perlu adanya kegiatan pengawasan di sektor perikanan , namun pengawasan yang dimaksud tidak hanya menitikberatkan pada peran pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, seperti halnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Indragiri Hilir dalam mengawasi kegiatan usaha perikanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2010 yang telah diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan pada pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa dinas kelautan dan perikanan, yang selanjutnya disebut dengan dinas adalah dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Pasal 1 Ayat (1).

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 1 Ayat (5).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 2 berbunyi:

- (1) Usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan meliputi jenis kegiatan :
 - a. Pembudidayaan ikan air tawar
 - b. Pembudidayaan ikan air payau
- (2) Jenis usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan meliputi:
 - a. Usaha pembenihan ikan.
 - b. Usaha pembesaran ikan.
 - c. Usaha pembeninaan dan pembesaran ikan.
- (3) Usaha pembenihan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf (a), meliputi kegiatan pemeliharaan calon induk, pemijahan, penetasan telur dan/ atau pemeliharaan larva/ benih/ bibit.
- (4) Usaha pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf (b), meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.¹²

Berdasarkan bunyi dari Pasal 2 tersebut telah diterangkan mengenai subjek dan objek Izin Usaha Perikanan. Sementara dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi izin Usaha perikanan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di daerah wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

(2) Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk SIUP oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

- a. SIUP Pembenihan Ikan.
- b. SIUP Pembesaran Ikan.
- c. SIUP Pembenihan dan Pembesaran Ikan.¹³

Sesuai dengan bunyi dari Pasal 3 telah tertera jenis Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan pengamatan penulis banyak terdapat usaha perikanan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir Khususnya di Kecamatan Tembilahan, namun tidak semuanya memiliki Izin Usaha Perikanan, hal ini tentu diperlukan sebuah pengawasan yang dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 33 berbunyi “Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Perikanan”.¹⁴

Masih banyaknya pelaku usaha di bidang perikanan yang belum memiliki Izin Usaha Perikanan di wilayah Kecamatan Tembilahan, disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Indragiri Hilir terhadap Izin Usaha Perikanan. Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk meneliti pengawasan oleh Dinas

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 3.

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kelautan dan Perikanan Indragiri Hilir untuk dijadikan proposal dengan judul : **“PENGAWASAN DINAS PERIKANAN INDRAGIRI HILIR TERHADAP IZIN USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada Pengawasan Dinas Perikanan Indragiri Hilir terhadap izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan oleh Dinas Perikanan terhadap izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan?
2. Apa saja kendala-kendala yang menghambat pengawasan Dinas Perikanan terhadap izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan oleh Dinas Perikanan terhadap izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan.
- b. Untuk Mengetahui apa saja kendala-kendala yang menghambat Pengawasan oleh Dinas Perikanan terhadap izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai Pengawasan oleh Dinas Perikanan terhadap izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai Pengawasan oleh Dinas Perikanan terhadap izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan.

c. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaanya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.¹⁵ Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyelesaikan atau menjawab problem.¹⁶ Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang di temukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Dinas Perikanan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Perikanan

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai pengawasan Dinas Perikanan Indragiri Hilir terhadap Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.¹⁷ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang mana paling utama adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 1 orang. Kepala Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir 1 orang. Seksi Kemitraan dan Informasi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 1 orang. Seksi Pencatatan Usaha Budidaya dan Kapal Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 1 orang. Pelaku Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan yang memiliki izin usaha perikanan sebanyak 2 orang. Pelaku Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan yang tidak memiliki izin usaha perikanan sebanyak 6 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *total Sampling*. *total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.¹⁹ Sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi yang akan diteliti berjumlah 12 orang.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 118.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 119.

¹⁹ Joko Subagyo, *Op Cit*, hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase %
1.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	1 Orang	1 orang	100%
3.	Seksi Kemitraan dan Informasi Usaha Kecil Pembudidaya Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	1 Orang	1 Orang	100%
4.	Seksi Pencatatan Usaha Budidaya dan Kapal Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	1 Orang	1 Orang	100%
5.	Pelaku Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan yang memiliki izin usaha perikanan	2 Orang	2 Orang	100%
6.	Pelaku Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan yang tidak memiliki izin usaha perikanan	6 Orang	6 Orang	100%

Sumber Data: lapangan 2021

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir baik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.²⁰ Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan merupakan data yang sudah diolah.²¹

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. peneliti melakukan observasi terhadap pengawasan Dinas Perikanan Indragiri Hilir terhadap Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap komponen yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang bergerak dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin usaha perikanan yaitu di bidang pengawasan untuk memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain.

²⁰ *Ibid*, hlm. 87.

²¹ *Ibid*, hlm. 88.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai pengawasan Dinas Perikanan Indragiri Hilir terhadap Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²²

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis dalam lima (5) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu sistem dan memiliki ketertarikan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu perasatu bab tersebut.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 252.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian.

BAB III : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori sebagai berikut yaitu : teori pengawasan, teori perizinan, teori kewirausahaan, teori penegakan hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil uraian penelitian dan pembahasan tentang isi bab ini sesuai rumusan masalah terkait Pengawasan oleh Dinas Perikanan terhadap izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan dan kendala-kendala yang menghambat pengawasan Dinas Perikanan terhadap izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir adalah kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia yang memiliki motto: “Berlayar sampai kepulau, berjalan sampai kebatas”. Kabupaten Indragiri Hilir beribu kota di Tembilahan yang berdiri pada tanggal 20 November 1965 dan saat ini berjumlah penduduk sekitar 717. 803 jiwa yang tersebar di 20 kecamatan, 38 kelurahan, dan 198 desa.²³

Suku-suku yang tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir yang beragam terhitung dari suku bugis, melayu, banjar, jawa, tionghoa, dan lain sebagainya. Dengan agama yang mendominasi adalah Islam, serta diikuti dengan agama Budha dan Kristen. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatra Tengah berdasarkan Ssrat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

²³[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir#:~:text=Kerajaan%20Indragiri%20diperkirakan%20berdiri%20tahun,Datuk%20Patih%20atau%20Perdana%20Menteri,Diakses](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir#:~:text=Kerajaan%20Indragiri%20diperkirakan%20berdiri%20tahun,Datuk%20Patih%20atau%20Perdana%20Menteri,Diakses%20pada%20tanggal%2028%20Januari%202021,%20jam%2008%3A42%20Wib) pada tanggal 28 Januari 2021, jam 08:42 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan: “Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang 2025”. Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yang sifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensi.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusinya pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pula dari sisi mutu sumberdaya manusianya dengan menggunakan indikator sosial budaya yang dapat dilihat dari tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercermin melalui tingkat pendidikan masyarakat terendah, dan budaya masyarakat, sedangkan untuk derajat kesehatan masyarakat dilihat dari angka harapan hidup yang semakin panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, disamping indikator-indikator ekonomi dan sosial budaya tersebut, juga indikator politik, hukum, keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan daerah. Suatu kemajuan yang hebat dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis dan konseptual antara kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah.

1. Letak Geografis

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 km² atau 19,737 Ha. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara dengan kecamatan Batang Tuaka
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
4. Sebelah Timur dengan Kecamatan Batang Tuaka

Tinggi pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2012 yaitu 271,1 mm dan terendah pada bulan Januari 2012 yaitu 0 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Desember 2012 sebanyak 20 hari dan terendah terjadi pada bulan Januari 2012 sebanyak 0 hari.

Luas wilayah desa/kelurahan di kecamatan Tembilahan tahun 2012 di kelurahan Kota Tembilahan luasnya 3,34 Km². Banyaknya hari dan curah hujan kecamatan Tembilahan tahun 2012 dari bulan Januari sampai Desember berjumlah 130 hari hujan dan 1.1663 curah hujan (mm).

2. Keadaan Demografi

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan seiring disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pemabaruan atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut.

Penduduk Kecamatan Tembilahan pada tahun 2012 berjumlah 72.446 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Kelurahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling banyak penduduknya adalah Tembilahan Kota yaitu 25.191 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kelurahan Sungai Perak yaitu 3.501 jiwa.

Sex ratio Kecamatan Tembilahan adalah 101(di atas 100) menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 36.565 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 35.881 jiwa.

Kepadatan Penduduk di Kecamatan Tembilahan adalah 367 jiwa per Km². Kelurahan yang paling padat penduduknya adalah Kelurahan Tembilahan Kota dengan tingkat kepadatan 7542 jiwa per Km². Sedangkan Kelurahan yang paling jarang penduduknya adalah Kelurahan Sungai Perak dengan tingkat kepadatan 59 jiwa per Km². Kecamatan Tembilahan terdiri dari 8 Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Tembilahan Hilir
2. Kelurahan Tembilahan Kota
3. Kelurahan Seberang Tembilahan
4. Kelurahan Pekan Arba
5. Kelurahan Sungai Perak
6. Kelurahan Sungai Beringin
7. Kelurahan Seberang Tembilahan Barat
8. Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan.

Jarak antar desa/ kelurahan ke Ibukota Kecamatan kabupaten tahun 2012 antara Tembilahan Kota 1.00 jarak (Km²).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. II.1

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Tembilahan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase%
1	Laki-laki	36,565	50,472 %
2	Perempuan	35,881	49,528 %
	Jumlah	72,446	100%

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2020

3. Agama dan Pendidikan

Pembinaan sumber daya manusia Indonesia adalah berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya. Artinya, bangsa Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang berkeseimbangan, antara intensitas spiritual atau kualitas intelektual. Dengan kata lain, bangsa Indonesia haruslah sebagai individu yang beriman, berilmu, dan berketerampilan teknologi yang tinggi.

Masyarakat Kecamatan Tembilahan adalah masyarakat yang sangat intens dengan nuansa kultural religius Islami, bahkan sampai pada tingkat fanatisme. Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kecamatan Tembilahan, tanpa menafikkan keberadaan agama minoritas lainnya. Heterogenitas etnis dan budaya secara sosial dapat dipersatukan oleh homogenitas agama, yaitu Islam. Semboyan *cultural Malay identic with Islam* masih sangat rentan di bumi Sri Gemilang Indragiri Hilir ini. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel II.2 berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2

Agama yang di Anut Masyarakat di Tembilahan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Islam	61.783	99,78%
2	Protestan	84	0,14%
3	Katolik	-	-
4	Hindu	48	0,08%
5	Budha	-	-
	Jumlah	61,915	100%

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2020

Tabel II.3

Sarana Ibadah di Tembilahan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Mesjid	35	41,17%
2	Mushola	31	36,47%
3	Gereja Protestan	17	20%
4	Vihara	1	1,18%
5	Kelenteng	1	1,18%
	Jumlah	85	100%

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2020

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Sejalan dengan isu strategi kebijakan pembangunan yang bertitik sentral pada persoalan K2I, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan tetap berupaya maksimal mungkin untuk meningkatkan pengadaan dan pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkualitas.

Kondisi objektif menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kecamatan Tembilahan masi menghadapi berbagai persoalan yang perlu dihadapi dan diatasi. Persoalan ekonomi masi dialami oleh masyarakat, sehingga masih cukup banyak anak-anak usia sekolah belum dapat mengenyam atau menduduki bangku sekolah sebagaimana mestinya. Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan penyebaran sekolah-sekolah belum menjangkau seluruh daerah secara merata.

Selain dari pada itu, kuantitas dan kualitas serta pendistribusian tenaga guru adalah persoalan lain yang juga harus diatasi. Baik secara kuantitas atau kualitas, keberadaan tenaga guru atau pengajar masih terasa sangat kurang di Kecamatan Tembilahan. Sementara penyebaran tenaga yang ada masih belum merata secara proporsional diberbagai daerah, terjadi konsentrasi atau penumpukan di Kota kecamatan dan lebih-lebih di kota kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.4

Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah(Siswa)	Persentase%
1	SD	9.322	56,91%
2	MI	199	1,21%
3	SMP	1.705	10,40%
4	MTS	1.554	9,47%
5	SMA	1.500	9,1%
6	SMK	1.948	11,87%
7	Ma	172	1,04%
	Jumlah	16.400	100%

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2020

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Penduduk yang berada di daerah Indragiri Hilir pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang Pertanian Pangan, Perkebunan dan sebagian lainnya bergerak dibidang nelayan, perdagangan dan kerajinan industri.²⁴

B. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

Didalam suatu organisasi terdapat struktur yang menjelaskan tugas wewenang dan tanggung jawab. Hubungan dan tata kerja dari pada anggota yang ada dalam organisasi tersebut, struktur organisasi tersebut

²⁴<https://inhilkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/ca81464d2ab830fb406c5773/kecamatan-tembilahan-dalam-angka-2020.html>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2021, jam 17:02 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan susunan dari pada bagian-bagian dalam suatu hubungan. Organisasi itu sendiri merupakan wadah kegiatan orang-orang yang bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan. Dinas Perikanan Indragiri Hilir adalah suatu organisasi yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat (*Public Utility*).

Berhasil tidaknya pelaksanaan pekerjaan tergantung dari pada organisasi dapat menunjukan batas-batas dan tanggung jawab masing-masing dari pejabat yang dipegang, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Artinya batas-batas dan tanggung jawab dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.

Struktur organisasi Dinas Perikanan adalah berbentuk organisasi lini dan staf adalah organisasi yang pada umumnya dipergunakan pada organisasi pemerintah. Termasuk Dinas Perikanan sebagai organisasi pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan lini adalah orang-orang atau unit-unit yang secara langsung ikut serta melaksanakan tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan staf adalah unit-unit yang tidak secara langsung ikut serta mencapai tujuan organisasi. Tetapi hanya memberikan kontribusinya dalam hal-hal yang tidak langsung menyediakan bantuan dibidang kepegawaian, keuangan, material dan bantuan lainnya, baik untuk kepentingan unit staf sendiri maupun unit lini.

Bentuk organisasi lini dan staf mempunyai kebaikan dan kelemahan, kebaikan organisasi lini dan staf antara lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dapat digunakan setiap organisasi besar, apapun tujuannya, betapapun luasnya dan betapa pun kompleks suatu organisasi.
- b. Pengambilan keputusan yang sehat lebih mudah dapat diambil karena adanya staf ahli.
- c. Prinsip “*The Reght Man In The Right Place*” lebih mudah dilaksanakan.
- d. Pengembangan diri dapat dikembangkan menjadi spesialisasi.
- e. Kordinasi dapat dijalankan dalam setiap kelompok kerja.
- f. Disiplin serta moral biasanya tinggi, karena tugas yang dijalankan sesuai dengan bakat, pendidikan dan pengalaman.
- g. Adanya pembagian tugas yang jelas antara kelompok lini dan staf.

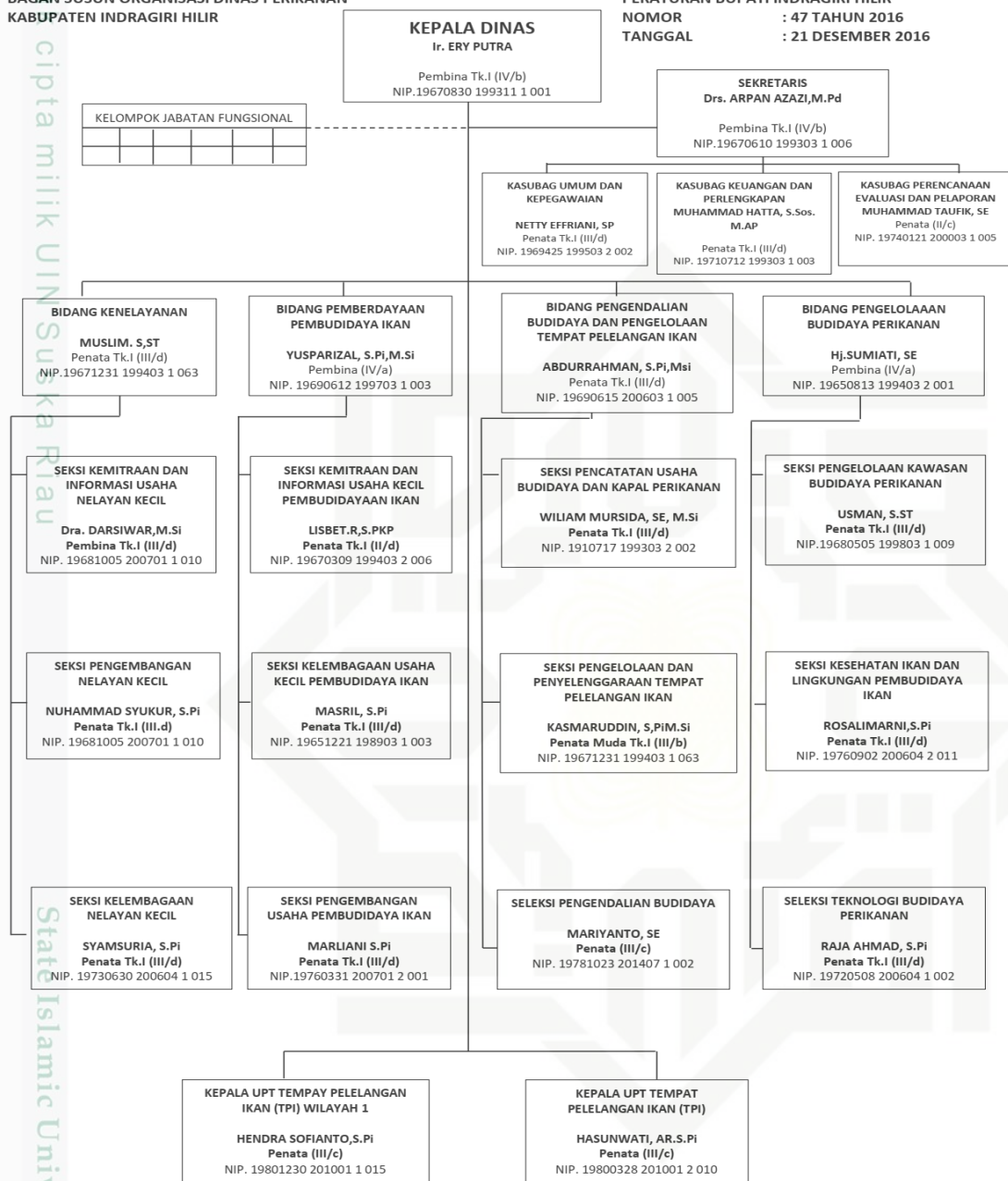
Sedangkan kelemahan organisasi lini dan staf antara lain:

- (a) Karena karyawan tidak saling mengenal, solidaritas sukar diharapkan
- (b) Karena rumit dan kompleksnya susunan organisasi, koordinasi kadang-kadang sukar diharapkan sukar diterapkan.
- (c) Bagi pelaksana, tidak jelas mana yang datang dari atas, bersifat perintah dan mana pula yang bersifat nasehat.
- (d) Perintah dari dua jenis jenjang hierarki/jenjang tidak selalu bersama karena bedanya pandangan tentang suatu hal dari sudut yang sama.

Gambaran dari pada struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang berbentuk lini dan staf adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAGAN SUSUN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Gambar II.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 3 Sub Bagian, 4 Bidang dan 12 Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional serta UPT

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Kasubbag bagian umum dan kepegawaian.
 - b. Kasubbag bagian keuangan dan perlengkapan.
 - c. Kasubbag perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
3. Bidang kenelayanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi kemitraan dan informasi usaha nelayan kecil.
 - 2) Seksi pengembangan nelayan kecil.
 - 3) Seksi kelembagaan nelayan kecil.
4. Bidang pemberdayaan pembudidayaan ikan, terdiri dari:
 - 1) Seksi kemitraan dan informasi usaha kecil pembudidayaan ikan.
 - 2) Seksi kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
 - 3) Seksi pengembangan usaha pembudidayaan ikan.
5. Bidang pengendalian budidaya dan pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI), terdiri dari:
 - 1) Seksi pencatatan usaha budidaya dan kapal perikanan.
 - 2) Seksi pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
 - 3) Seksi pengendalian budidaya.
6. Bidang pengelolaan budidaya perikanan, terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Seksi pengelolaan kawasan budidaya perikanan.
- 2) Seksi kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan.
- 3) Seksi teknologi budidaya perikanan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tugas Pokok:

Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perikanan.

Fungsi

Perumusan kebijakan teknis dibidang Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

- a. Perumusan teknis dibidang Perikanan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Pengelolaan sarana dan prasaraka perikanan
- c. Pembinaan dan pembangunan usaha perikanan
- d. Pengembangan, pelestarian dan perlindungan perikanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi.
- f. Fasilitas pengembangan usaha dan pemasaran perikanan.
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perikanan.

3. Personil

Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 96 orang terdiri dari 63 pegawai negeri sipil dan 30 tenaga honor/kontrak dan dari 37 pegawai negeri sipil terdapat 21 orang yang menduduki jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut :

1. PNS Struktural	66 orang
2. CPNS Struktural	- orang
3. PNS Fungsional	- orang
4. CPNS Fungsional	- orang
5. Tenaga honorer.....	30 orang
Jumlah	96 orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pengawasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepihak yang dibawahnya. Lembaga administrasi negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.²⁵

Menurut Siagian, Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁶ Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁷ Jadi tujuan pengawasan hanyalah untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu. Kata yang semestinya dalam pengertian diatas adalah tolak ukur yang mengandung tiga segi, yaitu: sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

²⁵ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yusdisia, 2016), hlm. 13.

²⁶ S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta:Gunung Agung, 1986), hlm. 112.

²⁷ Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas).²⁸

1. Tujuan Pengawasan

Pengawasan berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya, terutama dengan perencanaan. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa kegiatan dan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, pengawasan diadakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan intruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

²⁸ Angger Sigit Pramukti, Meylani Cahyaningsih, *Op. Cit*, hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Pengawasan

Sebuah pengawasan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh sebuah organisasi maka pengawasan tersebut akan memberikan manfaat yang sangat berguna bagi organisasi. Menurut Sondang P. Siagian manfaat dari pengawasan yaitu:

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
2. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
3. Memberikan pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
4. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
5. Tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

3. Macam-macam Pengawasan

Terdapat macam-macam pengawasan diantaranya sebagai berikut:

a. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.²⁹

b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

c. Pengawasan Preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/ kesalahan dalam pelaksanaan.

d. Pengawasan Represif³⁰

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya

²⁹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 62.

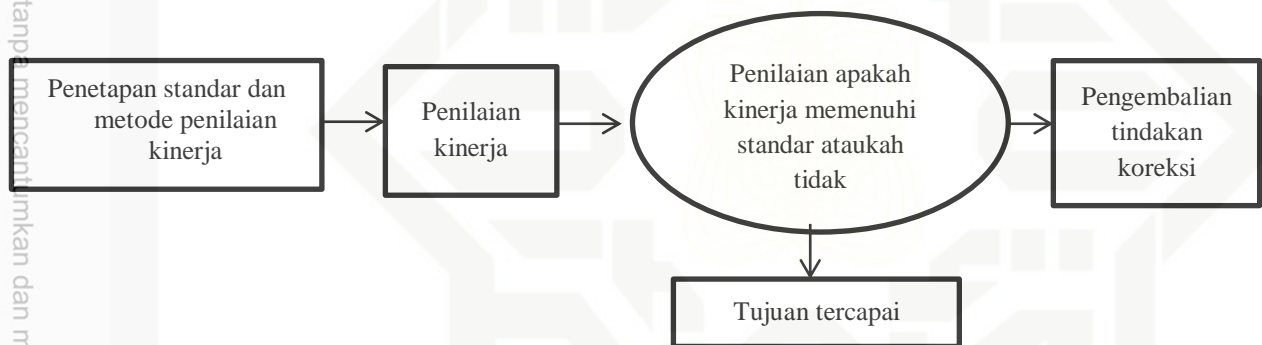
³⁰ *Ibid*, hlm. 64.

pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Langkah-langkah Pengawasan

Terdapat beberapa langkah-langkah dalam proses pengawasan diantaranya:

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja
2. Penilaian kinerja
3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak
4. Pengembalian tindakan koreksi.³¹



Gambar III. 1 Proses Pengawasan

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Tujuan pengawasan pemerintah

³¹ Ernie Tisnawati Sule, *Op.Cit*, hlm. 321.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pusat terhadap daerah adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah yaitu kesejahteraan bagi masyarakat daerah itu dapat terlaksana.³²

B. Teori Perizinan

Didalam Kamus Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai; “*Overheidistoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd*” (perkenan/izin dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau “*Alsopheffing van een algemen verbodsregel in het conrete geval*”, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan Peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

³² Jum Angraini, *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, (Jakarta: Tama Jagakarsa, 2011), hlm. 60.

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, menurut peneliti perizinan adalah suatu hal yang bersifat administratif guna mendapatkan suatu legalitas dari sebuah objek yang diurus perizinanya.

1. Fungsi Pemberian Izin

Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Instrumen Rekayasa Pembangunan Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan.
- b. *Budgetering*, Perizinan memiliki fungsi keuangan (*Budgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara, pemeberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan.
- c. *Reguleren* Perizinan memiliki fungsi pengaturan (*Reguleren*), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat, sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat.

2. Tujuan Pemberian Izin

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilakukan oleh pihak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi (tujuan praktis) yaitu:

a. Dari sisi Pemerintah tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Melaksanakan Peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
- 2) Sebagai Sumber Pendapatan Daerah dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapat pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan permohonan harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi Masyarakat tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum
- 2) Untuk adanya kepastian hak
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.³⁴

C. Teori Kewirausahaan

Secara bahasa kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneurship, sedangkan wirausaha berasal dari kata entrepreneur.³⁵ Kata entrepreneur

³⁴ Ibid, hlm. 200.

³⁵ Irham Fahmi, *Kewirausahaan Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari bahasa Perancis, yaitu *entreprende* yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu), dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya.³⁶

Menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuchl dalam buku *Entrepreneur* (1999), kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Zimmerer mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha). Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Peter F. Drucker, artinya, untuk menciptakan sesuatu diperlukan suatu kreativitas jiwa inovator yang tinggi. Seseorang yang memiliki kreativitas dan jiwa inovator tentu berpikir untuk mencari atau menciptakan peluang yang baru agar lebih baik dari sebelumnya.³⁷ Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan pengusaha, kegiatan usaha tersebut menuntut kreativitas dan kecerdasan pengusaha dalam melihat peluang usaha yang ada.

1. Ruang Lingkup Kewirausahaan

Secara umum ruang lingkup kewirausahaan adalah bergerak dalam bisnis. Namun secara garis besar ruang lingkup kewirausahaan bergerak pada bidang:

³⁶ Muhammad Anwar H.M, *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 2.

³⁷ Soekartawi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Lapangan Agraris
 - 1) Pertanian
 - 2) Perkebunan dan kehutanan
- b. Lapangan Perikanan
 - 1) Pemeliharaan ikan
 - 2) Penetasan ikan
 - 3) Makanan ikan
 - 4) Pengangkutan ikan
- c. Lapangan Peternakan
 - 1) Bangsa burung atau unggas
 - 2) Bangsa binatang menyusui
- d. Lapangan Perindustrian dan Kerajinan
 - 1) Industri besar
 - 2) Industri menengah
 - 3) Industri kecil
 - 4) Pengarajin
 - 5) Pengolahan hasil pertanian
 - 6) Pengolahan hasil perkebunan
 - 7) Pengolahan hasil perikanan
 - 8) Pengolahan hasil Peternakan
 - 9) Pengolahan hasil Kehutanan
- e. Lapangan Pertambangan dan Energi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Lapangan Perdagangan

- 1) Sebagai pedagang besar
- 2) Sebagai pedagang menengah
- 3) Sebagai pedagang kecil

g. Lapangan Pemberi Jasa

- 1) Sebagai pedagang perantara
- 2) Sebagai pemberi kredit atau perbankan
- 3) Sebagai pengusaha angkutan
- 4) Sebagai pengusaha hotel dan restoran
- 5) Sebagai pengusaha biro jasa travel pariwisata
- 6) Sebagai pengusaha asuransi, perdagangan, perbengkelan, koperasi, tata busana, dan lain sebagainya.³⁸

2. Manfaat Kewirausahaan

Menurut Thomas W. Zimmerer manfaat kewirausahaan adalah sebagai berikut:

- a. Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri.
- b. Memberi peluang melakukan perubahan.
- c. Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya.
- d. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin.
- e. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya.

³⁸ Irham Fahmi, *Op.Cit*, hlm. 14-16.

- f. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya.³⁹

Setiap wirausaha memiliki fungsi pokok dan fungsi tambahan sebagai berikut:

- a. Membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran.
- b. Memutuskan tujuan dan sasaran.
- c. Menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani.

D. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang baik dan mengejawantakan sebagai penjabaran nilai untuk mempertahankan kedamaian dalam hidup.⁴⁰ Penegakan hukum dalam tataran teoritis bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu juga dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif. Namun demikian, terminologi penegakan hukum saat ini telah mengarah pada suatu tindakan yakni menjatuhkan sanksi pidana.⁴¹ Lawrence M. Friedman⁴² mengemukakan

³⁹ Kusnadi, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Kreasi Edukasi, 2015), hlm. 44.

⁴⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 5.

⁴² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu:

1. Substansi hukum (*substance of the law*) Substansi hukum adalah aturan perundang-undangan, norma dan pola perilaku manusia yang berada pada sistem itu, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
2. Struktur hukum (*struktur of the law*) Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Ketika berbicara mengenai struktur hukum tidak terlepas dari institusi-institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan yang keseluruhannya memiliki tugas atau peranannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana. Hukum tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak dapat ditegakkan bila tidak ada aparat hukum yang berkredibilitas, kompeten, dan independen.
3. Budaya hukum (*legal culture*) Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi, bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan

belaka melainkan dukungan dari budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik.

Selain beberapa elemen di atas soejono soekanto juga menambah bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, diantaranya:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana pendukung
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan aspek-aspek tersebut secara stimulan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat terwujud secara nyata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada BAB IV diatas yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Pengawasan oleh Dinas Perikanan terhadap izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan dalam kenyataan masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan pelaku usaha perikanan mengenai adanya surat izin usaha perikanan, tidak hadirnya pelaku usaha perikanan dalam sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, ketidakpahaman mengenai prosedur dan mekanisme pembuatan surat izin usaha perikanan, serta ketidaktahuan para pelaku usaha perikanan yang tidak mempunyai izin mengenai arti pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Adapun kendala-kendala yang menghambat pengawasan Dinas Perikanan terhadap izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor komunikasi.

- b. Faktor disposisi.
- c. Faktor sumberdaya.
- d. Dana dan anggaran.

B. Saran

Agar Pengawasan Dinas Perikanan terhadap izin usaha perikanan berjalan lebih baik lagi, penulis mempunyai beberapa saran :

1. Diharapkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat meningkatkan jumlah izin usaha perikanan dan mempermudah segala prosedur dan mekanisme pembuatan surat izin usaha perikanan.
2. Perlunya penambahan petugas teknis dan petugas penyuluh lapangan.
3. Perlunya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha.
4. Diharapkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melayani para pelaku usaha perikanan yang ingin membuat surat izin usaha perikanan agar diarahkan sesuai dengan prosedur sehingga mempermudah para pelaku usaha perikanan dalam membuat surat izin usaha perikanan.
5. Untuk menekan angka pelaku usaha perikanan yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan perlu adanya pengawasan yang lebih dan berkordinasi dengan instansi yang terkait dilapangan.
6. Seluruh karyawan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir agar bekerja lebih ditingkatkan dari sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang sesuai dengan perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Angraini Jum, 2011, *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Jakarta: Tama Jagakarsa.
- Fahmi Irham, 2016, *Kewirausahaan Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung: Alfabeta.
- Friedman M Lawrence, 2013, *Sistem Hukum: Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- H.M Anwar Muhammad, 2014, *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda Ni'matul 2010, *Problematisasi Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press.
- HR Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kusnardi Moh, 1993, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama.
- Kusnadi, 2015, *Kewirausahaan*, Jakarta: Kreasi Edukasi.
- Lubis Solly M, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Pramukti Sigit Angger 'dan' Meylani Cahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yusdisia.
- Siagian S.P, 1986, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Simbolon Masry Maringan, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Soekartawi, 2005, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Subagyo Joko, 2011, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sule Ernie Tisnawati, 2010, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana.
- Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wignjosoebroto Soetandyo, 2005, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda (Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhiir Kekuasaan Kolonial di Indonesia 1900-1940)*, Malang: Bayumedia Publishing.

B. Jurnal

- Nyoman Radiarta, *Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process*, (Volume 10, Nomor 1, Juni 2015), hlm. 48.

C. Web

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir#:~:text=Kerajaan%20Indragiri%20diperkirakan%20berdiri%20tahun,Datuk%20Patih%20atau%20Perdana%20Menteri. Diakses pada tanggal 28 Januari 2021, jam 08:42 Wib
- [https://inhilkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/ca81464d2ab830fb406c5773/kecamatan-tembilahan-dalam-angka-2020.html.](https://inhilkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/ca81464d2ab830fb406c5773/kecamatan-tembilahan-dalam-angka-2020.html) Diakses pada tanggal 2 Februari 2021, jam 17:02 Wib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Undang-undang, Peraturan, dan Sejenisnya

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 25 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 25A Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Pasal 1 Ayat (1).

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 1 Ayat (5).

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 2.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 3.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Pasal 33.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *"PENGAWASAN DINAS PERIKANAN INDRAGIRI HILIR TERHADAP IZIN USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI KECAMATAN PEMBAHILAHAN"* yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD NOVRI**
NIM : 11727101998
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Joni Alizon, SH., M.H

Penguji II
Syafrinaldi SH., MA

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Indragiri Hilir Terhadap Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan ditulis oleh saudara :

Nama : MUHAMMAD NOVRI

NIM : 11727101998

Program Studi : ILMU HUKUM

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 29 Desember 2020

Narasumber : Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,
Narasumber

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

NIP. 196309091990021001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

d. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

e. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

f. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

g. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

h. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

i. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

j. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

k. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

l. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

m. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

n. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

o. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

p. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

q. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

r. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

s. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

t. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

u. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

v. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

w. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

x. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

y. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

z. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2459/2021
Sifat Biasa
Lamp. 1 (Satu) Proposal
Hal Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 01 Maret 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD NOVRI
NIM : 11727101998
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN INDRAGIRI HILIR
TERHADAP IZIN USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA PERIKANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hal yang dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39227
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2459/2021 Tanggal 1 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

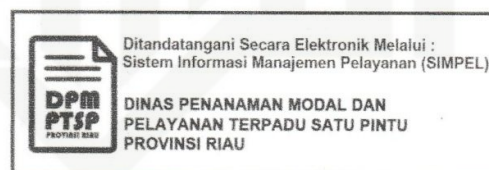
- | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : MUHAMMAD NOVRI |
| 2. NIM / KTP | : 11727101998 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN INDRAGIRI HILIR TERHADAP IZIN USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/gg

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syaria'ah dan Hukum Nomor : Un. 04 / F.1.1/PP.00.9/1531/2021 Tanggal 29 Januari 2021, Hal Mohon Izin Melakukan Riset Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **MUHAMMAD NOVRI**
NIM : 11727101998
Program studi/Jenjang : Ilmu Hukum / S1
Alamat : Lorong Bunga Padi RT 001 RW 0010 Kecamatan Tembilahan
Judul Penelitian : **PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN INDRAGIRI HILIR TERHADAP IZIN USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN**
Lokasi Penelitian : **DINAS PERIKANAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 08 April s/d 08 Juli 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitan ini.

Tembilahan, 08 April 2021`

**A.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,

H. NAZARUDIN, SE

Pembina Tk. I (III/d)

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang merugikan.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Satat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PERIKANAN

Jalan Bunga No. 12 Telp. (0768) 21087

TEMBILAHAN

29211

REKOMENDASI

Nomor : 800 /DP-SET/ 437...

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISE/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Pekanbaru,** Nomor : Un.04/F.I.I/PP.00.9/1531/2021 Tanggal 29 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : **MUHAMMAD NOVRI**
2. NIM/KTP : 11727101998
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **SI**
5. Alamat : **Jl. Swakarya Ikhlas Panam Pekanbaru**
6. Judul Penelitian : **PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN INDRAGIRI HILIR TERHADAP IZIN USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN.**
7. Lokasi : **Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : **Tembilahan**
Pada tanggal : **09 April 2021**



ARSAN AZAZI

Pembina TK. I

NIP 19670610 199303 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD NOVRI
 NIM : 11727101998
 Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan / 19 November 1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN DINAS PERIKANAN INDRAGIRI HILIR TERHADAP IZIN USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

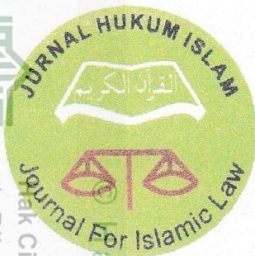
Pekanbaru, 15 Juni 2021

membuat pernyataan



MUHAMMAD NOVRI

NIM. 11727101998



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD NOVRI
NIM : 11727101998
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PENGAWASAN DINAS PERIKANAN INDRAGIRI HILIR TERHADAP IZIN USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN

Pembimbing: Mhd. Kastulani SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD NOVRI adalah Penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Muhammad Hatta, S.Sos, M.Ap dan Indrawati sebagai anak pertama dari dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada tanggal 19 November 1998. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri 007 Tembilahan (lulus tahun 2011), melanjutkan ke SMP Negeri 1 Tembilahan (lulus tahun 2014), kemudian SMA Negeri 1 Tembilahan (lulus tahun 2017) dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum.

Penulis juga aktif di dunia pergerakan organisasi. Dalam dunia pergerakan, penulis terlibat secara aktif di pergerakan Himpunan Mahasiswa (HMJ), Sementara di paguyuban penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Tembilahan (HIMATA), Selain aktif dipergerakan organisasi, penulis juga aktif dalam pergerakan dunia maya seperti di twitter, penulis tergabung dalam sebuah sirkel aktivis yang mengkritik kinerja pemerintah.

Selanjutnya mengenai pengalaman penulis, pada tahun 2019 penulis melakukan kegiatan magang di Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II A. Setelah itu, penulis melanjutkan Kuliah Kerja Nyata Daring (KKN DR) di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiti Hilir. Dengan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, pada tanggal 10 Juni 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Pengawasan Dinas Perikanan Indragiri Hilir Terhadap Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan”.